

Determinan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah di Indonesia

MUHAMMAD SATRIA INDRA PRATAMA¹, FITRI AMALIA²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
Email: muhammadsatriaindrapratama94@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia masih harus diperhatikan keberlangsungannya terkait Angka Partisipasi Kasar yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pendidikan. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah masih belum memenuhi target nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024 serta Indonesia menduduki peringkat rendah dalam survei (*Programme of International Assessment*). Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah sekolah, kualifikasi guru, APBD Sektor Pendidikan, PDRB per kapita, dan tingkat kemiskinan terhadap angka partisipasi kasar pendidikan menengah di Indonesia tahun 2018-2022. Menggunakan data sekunder dari 34 provinsi dan teknik analisis regresi data panel dengan metode *generalized least square* melalui Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sekolah, APBD sektor pendidikan, PDRB per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar. Sementara itu tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar, sedangkan kualifikasi guru tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka partisipasi kasar.

Kata kunci: Angka Partisipasi Kasar, Jumlah Sekolah, Kualifikasi Guru, APBD Sektor Pendidikan, PDRB Per Kapita, Tingkat Kemiskinan

ABSTRACT

Education in Indonesia's economic development still requires attention, particularly regarding the Gross Enrollment Rate (GER), which serves as a key indicator of educational success. The GER for secondary education has yet to meet the national targets outlined in the RPJMN 2015-2019 and 2020-2024, and Indonesia ranks low in the Programme for International Student Assessment (PISA) survey. This study aims to analyze the effects of the number of schools, teacher qualifications, regional education budgets, per capita GRDP, and poverty levels on the GER for secondary education in Indonesia from 2018 to 2022. Using secondary data from 34 provinces and panel data regression analysis with the Generalized Least Squares method through Eviews 12, results indicate that the number of schools, education sector APBD, and per capita GRDP have a positive and significant effect on GER, while poverty levels have a negative and significant effect. Teacher qualifications, however, do not significantly affect GER.

Keywords: Gross Enrollment Rate, Number of Schools, Teacher Qualifications, Education Sector APBD, Per Capita GRDP, Poverty Levels

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan negara dalam mensejahterakan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi pada modern ini tidak lagi dianggap sebagai suatu hal yang tradisional seperti melihat hanya adanya peningkatan pada PDB atau PDRB di suatu provinsi dan Kabupaten / kota yang biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi melihatnya dari sudut pandang yang lebih multidimensional (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi saat ini menganggap penurunan tingkat pengangguran, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, dan pengentasan garis kemiskinan sebagai salah satu hal yang harus diselesaikan permasalahannya, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya memfokuskan peningkatan pendapatan nasional saja melainkan sekaligus meningkatkan produktivitas.

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan pada pembangunan ekonomi, serta memiliki kepekaan terhadap kemiskinan dan pengangguran. Menurut Lewis salah satu upaya mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah melakukan transformasi sektor ekonomi dari sektor primer menuju ke arah sektor sekunder dan tersier melalui pembangunan sumber daya manusia dan peralihan tenaga kerja (Saedy et al., 2016). Pembangunan manusia diartikan sebagai perluasan akses atas masyarakat terhadap sektor kesehatan, pendidikan, serta pendapatan. Pendidikan dan pelatihan menjadi salah satu cara dalam memenuhi *human capital* dalam rangka meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya, yang selanjutnya produktivitas pun akan meningkat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang diturunkan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2020-2024, pemerintah menunjukkan upayanya untuk memperhatikan pembangunan manusia melalui pendidikan pada beberapa visinya, yaitu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas yaitu peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dalam rangka optimalisasi angka partisipasi pendidikan. Pendidikan di Indonesia tentunya masih mengalami beberapa tantangan seperti kualitas pendidikan di Indonesia tergolong masih cukup rendah, jika membandingkannya dengan negara lain. Dalam hasil survei *Programme for International Student Assessment* (PISA) pada tahun 2018, skor PISA Indonesia menempati posisi yang 74 dari 79 negara yang mengikuti survei atau di posisi 6 terbawah. Dimana dalam PISA ini melakukan *assessment* pada dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan sains.

Secara kuantitas, indikator keberhasilan yang digunakan dalam sasaran strategis Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Kemendikbud (Lakin) pada jenjang pendidikan menengah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) (Kemendikbudristek, 2023) yaitu indikator persentase jumlah penduduk yang sedang menempuh sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah tertentu. Selain itu, indikator ini menggambarkan keadaan umum penyerapan masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas dan pelayanan pendidikan tanpa ketepatan usia termasuk siswa yang mendaftar pada usia yang lebih dini, telat pendaftaran, dan siswa yang mengulang (Kemendikbudristek, 2023).

Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat pendidikan menengah secara ASEAN masih terlihat di bawah Thailand dan Filipina yang memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat pendidikan menengah masing-masing yaitu sebesar 98,02% dan 90,44% yang tercantum dalam LAKIN Kemendikbud 2022 (dalam data yang tersedia). Dalam jangka waktu 2018 - 2022 pula Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah belum ada yang menyentuh target kinerja yang tercantum dalam RPJMN dan Renstra Kemendikbud 2018-2024. Berikut adalah grafik terkait

realisasi dan target Angka Partisipasi Kasar (APK) pada pendidikan menengah di Indonesia pada tahun 2018 – 2022.

Grafik 1. Realisasi dan Target Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah di Indonesia tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik & Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023

Dalam ekonomi pendidikan dikenal istilah fungsi produksi, yaitu *input* diolah menjadi *output* yang dapat digunakan sebagai metode untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam pendidikan. Menurut (Cohn, 1979), *input* dalam pendidikan meliputi beberapa faktor seperti sekolah, siswa, dan non-sekolah. Faktor *input* sekolah meliputi tenaga pengajar, tenaga pendidikan lainnya, jumlah dan karakteristik bangunan, buku, dan sarana serta prasarana pendukung. Faktor non sekolah biasanya terkait dengan sosial ekonomi orang tua, suku, ukuran keluarga, rata-rata pendapatan, dan lain-lain (Wibowo, 2008). Sedangkan menurut (Todaro & Smith, 2012) dalam teori permintaan dan penawaran pendidikan, hal ini juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran pendidikan, dimana dalam permintaan lebih dipengaruhi oleh biaya pendidikan (sosial ekonomi masyarakat) dan keinginan seseorang untuk meningkatkan keterampilannya dan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Sedangkan penawaran seringkali lebih ditentukan oleh proses politik dan dibatasi oleh anggaran pemerintah. Pada tingkat keseluruhan penawaran memiliki acuan pada ketersediaan sekolah atau dianggap sebagai kuantitas bangunan sekolah, pilihan program & tingkatan, dan sumber daya lain seperti kelas dan guru (Ady, 2014).

Jumlah sekolah merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat, sebagai fasilitas tempat bertemunya tenaga pengajar dengan peserta didik. Dalam (Merini, 2022) Pembangunan fasilitas dan infrastruktur sekolah yang memadai juga dapat mendorong ketertarikan peserta didik untuk selalu mengenyam pendidikan hingga ke tingkat yang semakin tinggi. Selain itu, banyaknya sekolah yang terbangun akan mengurangi kesulitan terhadap aksesibilitas, sebab semakin banyak sekolah yang terdekat (Wardani & Sanda, 2020). Sehingga penambahan jumlah sekolah perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan minat dan kemudahan pada partisipasi pendidikan.

Kualitas guru dalam juga memiliki peranan penting dalam memberikan bimbingan, pengajaran, dan transfer pengetahuan di sekolah dalam rangka menciptakan lulusan/*output* yang berkualitas (Aulia, 2020). Hal ini tentunya berkaitan dengan kualifikasi guru dalam memberikan

pengajaran secara teori dan praktik sesuai dengan pemahaman tentang ilmu terkait (Rahimah et al., 2024). Dalam (Khadijah et al., 2022) dan (Aulia, 2020) dijelaskan bahwa kualifikasi akademik yang meningkat maka dalam pembelajaran akan mampu menggunakan metode yang sesuai dalam pembelajaran, kelas menjadi lebih hidup, menarik, dan inovatif sehingga akan menciptakan lulusan yang berkualitas, sehingga akan menarik minat penduduk untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan memperbesar kemampuan sekolah untuk memperbesar rombongan belajar yang diterima karena peningkatan kuantitas dan kualitas guru.

Selain itu, semenjak diberlakukannya PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah Daerah Provinsi yang mencakup desentralisasi dalam pendidikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga mempengaruhi partisipasi pendidikan masyarakat dimana kebijakan *mandatory spending* dan anggaran yang dialokasikan khusus untuk sektor pendidikan dapat membantu meningkatkan infrastruktur pendidikan dan pemerataan akses pendidikan, yaitu dalam upaya pembangunan sekolah, fasilitas, serta insentif tambahan karena biaya pendidikan menjadi lebih murah (Wardani & Sanda, 2020).

Faktor input non-sekolah juga memegang peranan penting dalam menentukan partisipasi pendidikan masyarakat, salah satunya seperti rata-rata pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat (Rutfiana & Hayati, 2020). Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai indikator dalam melihat rata-rata pendapatan dan tingkat kesejahteraan secara makro adalah PDRB Per Kapita. Dalam hal ini PDRB Per Kapita yang meningkat akan dapat mengurangi biaya relatif untuk menyekolahkan anak sebagaimana penelitian yang mengindikasikan peningkatan pendapatan dapat diasosiasikan terhadap peningkatan partisipasi pendidikan (Gupta et al., 1999), Sebab penurunan PDRB Perkapita akan membuat orang tua mengurangi pengeluaran pendidikan untuk mempertahankan konsumsi primernya (Chetty & Looney, 2006).

Indikator lain dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan, sebab berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi keluarga, (siska ayu et al., 2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Keluarga yang termasuk kedalam golongan miskin rentan untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan, yang akan menjerumuskan mereka kembali pada keterbelakangan. Jelasnya adalah Kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan atas pemenuhan kebutuhan primer, sehingga dianggap keterbelakangan dan menyebabkan rendahnya produktivitas yang akan menurunkan rendahnya pendapatan yang pada akhirnya dalam hal pendidikan, masyarakat yang termasuk dalam kemiskinan akan mengalami rendahnya investasi dan tabungan, terlebih untuk pendidikan karena mereka lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan primernya.

Berdasarkan *gap* permasalahan yang telah dijelaskan, maka diperlukan penelitian terkait Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah di Indonesia pada periode 2018-2022, dalam rangka melihat sejauh mana pengaruh faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi Angka Partisipasi Pendidikan Masyarakat dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar. Sehingga, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan, serta menjadi tambahan literatur mengenai keadaan ekonomi pendidikan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS). Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yaitu terkait dengan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah, Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah, Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi pada

Pendidikan Menengah, APBD Sektor Pendidikan, PDRB Per Kapita Sektor Pendidikan, dan Persentase Penduduk Miskin. Data ini diperoleh dari beberapa sumber seperti Badan Pusat Statistik Nasional, Kemendikbud, Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, dan Kementerian Keuangan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Angka Partisipasi Kasar dalam persen (Y) sebagai variabel dependen, sedangkan Jumlah Sekolah dalam unit bangunan (X1), Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi (X2), APBD Sektor Pendidikan dalam Miliar Rupiah (X3), PDRB Per Kapita Sektor Pendidikan dalam Ribu Rupiah (X4), dan Persentase Penduduk Miskin dalam persen (X5) sebagai variabel independen. Analisis yang digunakan atas dasar pemilihan model terbaik ialah *Fixed Effect Model* dengan menggunakan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS) melalui alat pengujian Eviews 12. Maka dari itu model regresi yang dihasilkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$APK_{it}^* = B_0^* + \beta_1^* JS_{it}^* + \beta_2^* PGMK_{it}^* + \beta_3^* APBDP_{it}^* + \beta_4^* PDRBPPK_{it}^* + \beta_5^* PPM_{it}^* + \epsilon_{it}$$

Keterangan

APK	: Variabel Angka Partisipasi Kasar
JS	: Variabel Jumlah Sekolah
PGMK	: Variabel Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi
APBDP	: Variabel APBD Sektor Pendidikan
PDRBPPK	: Variabel PDRB Per Kapita Sektor Pendidikan
PPM	: Variabel Persentase Penduduk Miskin
ϵ	: Variabel error
B	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4,$ dan β_5	: Parameter yang diestimasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis telah melakukan beberapa pengujian spesifikasi model dalam rangka mendapatkan model yang tepat di antara *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Hasil estimasi model terbaik yang didapatkan ialah model *fixed effect model* melalui uji chow dan uji hausman, penulis menemukan permasalahan dalam uji asumsi klasik yang salah satunya adalah terdapat heteroskedastisitas. Salah satu metode dalam mengatasi permasalahan ini adalah menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) sebagai salah satu upaya untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross-section*, sehingga menurut (Sedyadi, 2014) metode GLS dapat mengabaikan uji asumsi klasik. Dalam (Basuki, 2016) juga dijelaskan bahwa data panel lebih bersifat *cross-section*, sedangkan autokorelasi hanya terdapat pada *time series*, sehingga tidak wajib melakukan uji autokorelasi. Selanjutnya uji normalitas bukan merupakan syarat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Tabel berikut ini merupakan nilai dari pengujian dalam uji chow menggunakan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS) dan uji hausman yang menunjukkan nilai 0.0000 ($0.0000 < 0.005$) sehingga model terbaik yang dipilih adalah *fixed effect model*.

Tabel 1. Hasil Estimasi Model

Uji Chow			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	74.155526	(33,131)	0.0000
Uji Hausman			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	51.957547	5	0.0000

Sumber : hasil olah data menggunakan eviews 12 (2024)

Tabel diatas menunjukkan hasil pada uji pemilihan model terbaik yang akan digunakan dan setelah itu dilakukan uji multikolinearitas. Berdasarkan uji multikolinearitas, hasil menunjukkan nilai korelasi pada masing-masing variabel independen menunjukkan nilai di bawah 0,8 yang artinya tidak ada hubungan antar variabel independen atau lolos uji multikolinearitas. Berdasarkan model terbaik yang terpilih maka diperoleh persamaan model *fixed effect model* dengan pendekatan *Generalized Least Square (GLS)* sebagai berikut:

$$APK = 64.93 + 0.016JS + 0.052PGMK + 0.000APBDP + 0.009PDRBPPK - 1.388PPM + \epsilon_{it}$$

Berdasarkan hasil estimasi tersebut menggambarkan bahwa jumlah sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar pendidikan menengah, hal ini terlihat dari nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi ($0.0002 < 0.05$) dan memiliki koefisien regresi sebesar 0.015692. Selanjutnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi memiliki pengaruh positif terhadap angka partisipasi kasar pendidikan menengah ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0.051815, tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan, hal ini terlihat pada nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi ($0.1224 > 0.05$). APBD Sektor pendidikan menunjukkan nilai probabilitas yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.0051 ($0.0051 < 0.05$) dan koefisien regresi sebesar 0.000445 sehingga APBD Sektor Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar pendidikan menengah. Selanjutnya, PDRB Sektor Pendidikan Per Kapita memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 ($0.0000 < 0.05$) dan koefisien regresi sebesar 0.008824, hal ini menunjukkan bahwa PDRB Sektor Pendidikan Per Kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar pendidikan menengah. Persentase penduduk miskin menunjukkan nilai probabilitas yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi yaitu sebesar 0.0000 ($0.0000 < 0.05$) dan memiliki koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh negatif yaitu -1.388355, hal ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar pendidikan menengah.

Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* menggunakan pendekatan *Generalized Least Square (GLS)*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.92647	6.029075	10.76889	0.0000
JS	0.015692	0.004089	3.838055	0.0002
PGMK	0.051815	0.033329	1.554655	0.1224
APBDP	0.000445	0.000156	2.847632	0.0051
PDRBPPK	0.008824	0.001731	5.098452	0.0000
PPM	-1.388355	0.328187	-4.230379	0.0000
Root MSE	1.811588	R-squared		0.962047
Mean dependent var	115.7815	Adjusted R-squared		0.951038
S.D. dependent var	51.19875	S.E. of regression		2.063708
Sum squared resid	557.9148	F-statistic		87.38617
Durbin-Watson stat	1.551277	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: hasil olah data menggunakan eviews 12 (2024)

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil uji F-statistik memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang menunjukkan bahwa variabel Jumlah Sekolah, Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi, APBD Sektor Pendidikan, PDRB Sektor Pendidikan Per Kapita, dan Persentase Penduduk Miskin secara bersama-sama mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel maka

koefisien determinasi dilihat pada *Adjusted R-Square*. Hasil menunjukkan *Adjusted R-Square* memiliki nilai 0.951038 yang mengartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian (Jumlah Sekolah, Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi, APBD Sektor Pendidikan, PDRB Sektor Pendidikan Per Kapita, dan Persentase Penduduk Miskin) dapat menjelaskan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah sebesar 95.1% sedangkan 4.9% lainnya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Estimasi Efek Individu Fixed Effect Model Menggunakan Pendekatan GLS

Variable	Coefficient	Individual Effect	Variable	Coefficient	Individual Effect
C	64.92647				
JS?	0.015692				
PGMK?	0.051815				
APBDP?	0.000445				
PDRBPPK?	0.008824				
PPM?	-1.388355				
Fixed Effects (Cross)					
_ACEH--C	17.93329	82.85976	_NUSATENGGARABARAT--C	14.13498	79.06145
_SUMATERAUTARA--C	-11.70979	53.21668	_NUSATENGGARATIMUR--C	18.18877	83.11524
_SUMATERABARAT--C	3.218212	68.144682	_KALIMANTANBARAT--C	1.076283	66.002753
_RIAU--C	2.690713	67.617183	_KALIMANTANTENGAH--C	-3.875405	61.051065
_JAMBI--C	0.657918	65.584388	_KALIMANTANSELATAN--C	-5.678988	59.247482
_SUMATERASELATAN--C	0.249933	65.176403	_KALIMANTANTIMUR--C	8.448151	73.374621
_BENGKULU--C	25.03967	89.96614	_KALIMANTANUTARA--C	14.14277	79.06924
_LAMPUNG--C	4.507132	69.433602	_SULAWESIUTARA--C	10.24346	75.16993
_KEPBANGKABELITUNG--C	11.56272	76.48919	_SULAWESITENGAH--C	14.24573	79.1722
_KEPRIAU--C	11.42273	76.3492	_SULAWESISELATAN--C	-14.87070	50.05577
_DKIJAKARTA--C	-85.13616	-20.20969	_SULAWESITENGGARA--C	8.361023	73.287493
_JAWABARAT--C	-84.78211	-19.85564	_GORONTALO--C	26.50981	91.43628
_JAWATENGAH--C	-30.14359	34.78288	_SULAWESIBARAT--C	15.83378	80.76025
_DIYOGYAKARTA--C	6.090967	71.017437	_MALUKU--C	31.70346	96.62993
_JAWATIMUR--C	-71.17665	-6.25018	_MALUKUUTARA--C	19.32386	84.25033
_BANTEN--C	-26.16526	38.76121	_PAPUABARAT--C	39.84339	104.76986
_BALI--C	0.716276	65.642746	_PAPUA--C	27.39363	92.3201

Sumber: hasil olah data menggunakan evIEWS 12 (2024)

Tabel di atas menunjukkan hasil efek individu pada model estimasi *fixed effect model* menggunakan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS). Diperoleh persamaan efek individual untuk 34 provinsi di Indonesia terhadap Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah dengan persamaan sebagai berikut:

$$APK = \hat{\gamma}_i + 64.93 + 0.016JS + 0.05PGMK + 0.00APBDP + 0.01PDRBPPK - 1.39PPM + \epsilon_{it}$$

Dari persamaan dan tabel diatas dapat diketahui provinsi yang memiliki efek individu terendah ialah DKI Jakarta dengan nilai intersep akhir sebesar -20.20969 ketika variabel independen (Jumlah Sekolah, Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi, APBD Sektor Pendidikan, PDRB Sektor Pendidikan Per Kapita, dan Persentase Penduduk Miskin) bernilai 0 (nol) atau tidak mengalami perubahan. Sedangkan, provinsi yang memiliki efek individu tertinggi ialah Papua Barat dengan nilai intersep akhir sebesar 104.76986 ketika variabel independen (Jumlah Sekolah, Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi, APBD Sektor Pendidikan, PDRB Sektor Pendidikan Per Kapita, dan Persentase Penduduk Miskin) bernilai 0 (nol) atau tidak mengalami perubahan.

Pengaruh Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah terhadap Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah sekolah memiliki nilai koefisien regresi yaitu sebesar 0.016, hal ini memiliki arti bahwa terdapat pengaruh positif dimana setiap peningkatan satu unit pada jumlah sekolah akan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan menengah sebesar 0.016 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Selanjutnya, variabel jumlah sekolah memiliki nilai probabilitas t-statistik sebesar 0.0002 yaitu lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 5% ($0.0002 < 0.05$) sehingga variabel jumlah sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka partisipasi kasar pendidikan menengah.

Hal ini disebabkan karena penambahan jumlah bangunan sekolah menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Sehingga semakin banyaknya jumlah sekolah yang tersebar secara merata akan memberikan kemudahan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan, khususnya dalam memanfaatkan infrastruktur pendidikan yang tersedia (Virdam & Ariani, 2023). Lalu, Menambah jumlah bangunan sekolah terutama pada wilayah yang dominan terdapat masyarakat kurang mampu dapat meningkatkan minat partisipasi pendidikan karena pada wilayah yang dilakukan penambahan jumlah sekolah tersebut akan memberikan akses sekolah yang lebih dekat dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat baik untuk transportasi dan sebagainya dapat diminimalkan (Aulia, 2020).

Sesuai dengan teori permintaan dan penawaran dalam pendidikan yang diadaptasi oleh (Todaro & Smith, 2006), bahwa faktor penawaran seperti kuantitas dan kualitas sekolah mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi serta anggaran pendidikan seringkali ditentukan oleh proses politik. Sehingga hal terkait penambahan kuantitas bangunan sekolah dan besarnya anggaran ditetapkan lewat kebijakan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam pendidikan (Ady, 2014).

Pengaruh Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi terhadap Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persentase guru yang memenuhi kualifikasi memiliki nilai koefisien regresi yaitu sebesar 0.052, hal ini memiliki arti bahwa terdapat pengaruh positif dimana setiap peningkatan satu persen pada persentase guru yang memenuhi kualifikasi akan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan menengah sebesar 0.052 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Selanjutnya, variabel persentase guru yang memenuhi kualifikasi memiliki nilai probabilitas t-statistik sebesar 0.1224 yaitu lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi 5% ($0.1224 > 0.05$) sehingga variabel persentase guru yang memenuhi kualifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka partisipasi kasar pendidikan menengah.

Hal ini karena pemerataan kualitas guru masih perlu diperhatikan, sebab pada saat ini distribusi guru yang memenuhi kualifikasi masih terkonsentrasi pada wilayah atau sekolah tertentu. Selain itu, program pengembangan profesional yang berkelanjutan belum berjalan secara maksimal, yang menyebabkan adanya tantangan pada kesesuaian kompetensi guru dengan kurikulum yang berlaku serta materi pembelajaran terkini (Rahimah et al., 2024). Hal tersebut juga dibuktikan oleh (Bappeda Prov. Banten, 2018) yang menyatakan masih terdapat kendala dalam peningkatan kualitas guru, terutama dalam hal distribusi. Pemerintah menghadapi tantangan dalam perekrutan, penempatan, dan pengembangan guru secara efisien. Selain itu kerjasama antara lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan berbagai pemerintah pada berbagai tingkat dalam menjamin kualitas serta pemerataan distribusi tenaga pengajar yang belum optimal. Dari sisi kualitas pendidikan, ketidaksesuaian antara kualitas pengajaran dan hasil pendidikan disebabkan oleh kurangnya perhatian pada rekonstruksi

desain program dan keselarasan bidang ilmu yang menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas guru. Selain itu, pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan berkesinambungan belum dilaksanakan dengan efektif.

Hal ini berbeda dengan penelitian (Khadijah et al., 2022) dan (Dewi, 2024) bahwa peningkatan kuantitas pada guru yang memenuhi kualifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *output/outcome* pendidikan, hal ini karena jumlah guru yang memiliki kualifikasi tinggi cenderung lebih profesional, kreatif, menguasai metode dan pembelajaran dengan baik sehingga akan menghasilkan lulusan yang berkualitas, oleh karena itu akan mendorong partisipasi pendidikan dari orang tua dan siswa.

Pengaruh APBD Sektor Pendidikan terhadap Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel APBD Sektor Pendidikan memiliki nilai koefisien regresi yaitu sebesar 0.00045, hal ini memiliki arti bahwa terdapat pengaruh positif dimana setiap peningkatan satu miliar pada APBD Sektor Pendidikan akan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan menengah sebesar 0.00045 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Selanjutnya, variabel APBD Sektor Pendidikan memiliki nilai probabilitas t-statistik sebesar 0.0051 yaitu lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 5% ($0.0051 < 0.05$) sehingga variabel APBD Sektor Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka partisipasi kasar pendidikan menengah.

Hal ini disebabkan karena APBD Sektor Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan pemerataan akses dalam kemudahan dan kelengkapan layanan pendidikan. Anggaran tersebut diharapkan digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah, kompetensi guru, dan fasilitas pendukung lainnya, dalam rangka mengurangi beban biaya operasional pendidikan yang ditanggung keluarga serta tidak hanya mementingkan kuantitas tapi meningkatkan kualitas pula (Rutfiana & Hayati, 2020). Sejalan dengan Hal tersebut terkait anggaran ini juga memberikan dukungan subsidi biaya tidak langsung seperti KJP, KIP, BOSDA, dan lain-lain serta penyediaan buku-buku dan alat peraga pendidikan dalam rangka memberikan keringanan biaya tidak langsung pendidikan sehingga akan meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat dalam partisipasi pendidikan (Wardani & Sanda, 2020).

Hasil ini juga sesuai dengan teori permintaan dan penawaran pendidikan yang diadaptasi oleh (Todaro & Smith, 2012) bahwa faktor penawaran seperti kuantitas dan kualitas sekolah mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi serta anggaran pendidikan seringkali ditentukan oleh proses politik sehingga dengan semakin meningkatnya anggaran akan memberikan akses pendidikan bagi masyarakat lewat subsidi dan peningkatan fasilitas. Dalam teori *Total Quality Management in Education* oleh (Sallis, 1993) bahwa kualitas pendidikan dipengaruhi oleh anggaran lewat ketepatan penggunaan anggaran yang diberikan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kemudahan akses pendidikan.

Pengaruh PDRB Sektor Pendidikan Per Kapita terhadap Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB Sektor Pendidikan Per Kapita memiliki nilai koefisien regresi yaitu sebesar 0.008824, hal ini memiliki arti bahwa terdapat pengaruh positif dimana setiap peningkatan satu ribu pada PDRB Sektor Pendidikan Per Kapita akan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan menengah sebesar 0.008824 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Selanjutnya, variabel PDRB Sektor Pendidikan Per Kapita memiliki nilai probabilitas t-statistik sebesar 0.0000 yaitu lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 5% ($0.0000 < 0.05$) sehingga variabel PDRB Sektor Pendidikan Per Kapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka partisipasi kasar pendidikan menengah.

Hal ini disebabkan peningkatan PDRB Per Kapita memiliki peran dalam mendorong masyarakat dalam memanfaatkan akses dan fasilitas pendidikan serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pula karena dalam pendidikan terdapat biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat sehingga dibutuhkan kemampuan pembiayaan pendidikan pribadi lewat pendapatan (Rutfiana & Hayati, 2020), (Virdam & Ariani, 2023). Sejalan dengan penelitian (Dahiri, 2023) bahwa untuk mengakses dan berpartisipasi pada pendidikan yang lebih tinggi dibutuhkan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini maka PDRB Per Kapita mencerminkan kapasitas ekonomi wilayah yang lebih baik melalui investasi pribadi maupun kebijakan publik dalam akses membiayai pendidikan dan memanfaatkan kesempatan pendidikan yang tersedia.

Sesuai dengan teori permintaan dan penawaran pendidikan oleh (Todaro & Smith, 2012) dimana pada permintaan pendidikan terdapat biaya pendidikan yang harus dibayarkan lewat pendapatan. Sehingga dengan peningkatan pendapatan, permintaan terhadap partisipasi dalam pendidikan akan meningkat. Sebab masyarakat akan dihadapkan pada kemungkinan rasionalisasi konsumsi baik masa kini maupun masa depan dalam membantu memenuhi konsumsi primer yang belum terpenuhi atau menginvestasikannya dalam pendidikan, maka seiring peningkatan pendapatan atau daya beli (perekonomian) masyarakat maka kemampuan partisipasi pendidikan masyarakat akan meningkat.

Pengaruh Persentase Penduduk Miskin terhadap Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Persentase Penduduk Miskin memiliki nilai koefisien regresi yaitu sebesar -1.388355, hal ini memiliki arti bahwa terdapat pengaruh negatif dimana setiap peningkatan satu persen pada Persentase Penduduk Miskin akan menurunkan angka partisipasi kasar pendidikan menengah sebesar 1.388355 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Selanjutnya, variabel Persentase Penduduk Miskin memiliki nilai probabilitas t-statistik sebesar 0.0000 yaitu lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 5% ($0.0000 < 0.05$) sehingga variabel Persentase Penduduk Miskin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap angka partisipasi kasar pendidikan menengah.

Hal ini sesuai dengan penelitian (Virdam & Ariani, 2023) bahwa kerentanan pada masyarakat miskin akan terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan akan memberi batasan mereka pada pengeluaran untuk pendidikan. Selain itu, anggapan bahwa keterbelakangan dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang akan menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan (kemiskinan) selanjutnya akan memunculkan rendahnya investasi masyarakat pada pendidikan sehingga masyarakat sulit untuk mengakses pendidikan (siska ayu et al., 2021).

Sejalan dengan teori lingkaran kemiskinan dan *poverty trap* dimana daya beli rendah terhadap kebutuhan primer seperti pangan yang bergizi akan berdampak pada kesehatan rendah dan rendahnya produktivitas dan selanjutnya berpengaruh pada tingkat absensi dan partisipasi pendidikan yang rendah dan seterusnya. Pembahasan kemiskinan juga berkaitan dengan teori permintaan dan penawaran pendidikan dimana keadaan sosial dan ekonomi keluarga sangat mempengaruhi permintaan pendidikan dimana kondisi ekonomi keluarga yang rentan akan membatasi pengeluarannya dalam pendidikan sebab keluarga lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan primernya. Sebab terdapat biaya tidak langsung yang ditanggung oleh keluarga seperti transportasi, seragam, pangan, kebutuhan sekolah, dan lain-lain (Todaro & Smith, 2012).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan estimasi *fixed effect model* dengan pendekatan *generalized least square* dapat disimpulkan bahwa Jumlah sekolah Pendidikan Menengah di Indonesia memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah. Penambahan jumlah sekolah yang merata mempermudah akses pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin, dengan mengurangi biaya transportasi dan pengeluaran lainnya, juga memperbesar kapasitas wilayah dalam menerima murid. Sementara itu, persentase guru yang memenuhi kualifikasi menunjukkan pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap APK. Hal ini disebabkan oleh masalah distribusi guru yang masih terpusat di wilayah atau sekolah tertentu, serta kurang optimalnya program pengembangan profesional berkelanjutan yang menyebabkan tantangan dalam relevansi kompetensi guru dengan kurikulum terbaru.

Anggaran Pendidikan dari APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap APK, karena peningkatan anggaran memungkinkan perbaikan fasilitas pendidikan dan memberikan bantuan subsidi yang memudahkan masyarakat, terutama keluarga dengan kemampuan finansial terbatas, untuk berpartisipasi dalam pendidikan. PDRB sektor pendidikan per kapita juga berpengaruh positif dan signifikan, karena peningkatan pendapatan masyarakat meningkatkan kemampuan finansial untuk membiayai pendidikan. Sebaliknya, persentase penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap APK, karena kemiskinan membatasi kemampuan masyarakat untuk mengutamakan pendidikan, lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan dasar daripada berpartisipasi dalam pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ady, S. (2014). Pengaruh Permintaan Terhadap Outcome Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 2(1).
- Aulia, M. Y. (2020). Pengaruh Anggaran Pendidikan, Jumlah Guru dan Jumlah Kelas terhadap Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 155. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8534>
- Bappeda Prov. Banten. (2018). *KAJIAN STRATEGI PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PADA JENJANG PENDIDIKAN TINGKAT MENENGAH DI PROVINSI BANTEN*. Banten.
- Basuki, A. T. (2016). *ANALISIS DATA PANEL DALAM PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS (DILENGKAPI DENGAN PENGGUNAAN EVIEWS)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Chetty, R., & Looney, A. (2006). *Income Risk and the Benefits of Social Insurance Evidence from Indonesia and the United States* (No. 11708). NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC (Vol. 16). Cambridge.
- Cohn, E. (1979). *The Economics of Education* (revised). Cambridge: Ballinger Publishing Company. Diambil dari https://books.google.co.id/books?id=y6qX_yIkeHAC
- Dahiri, D. (2023). Pengaruh Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Dan Angka Partisipasi Murni. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah*

- Keuangan Negara*, 8(2), 312–331. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v8i2.164>
- Dewi, V. K. (2024). PENGARUH KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DI SMK PK BIM JOMBANG. *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah*, 2(4), 571–581.
- Gupta, S., Verhoeven, M., & Tiongson, E. (1999). *Does Higher Government Spending Buy Better Results in Education and Health Care?* (No. WP/99/21). Washington DC.
- Kemendikbudristek. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2022. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Khadijah, S., Ahyani, N., & Fitriani, Y. (2022). Pengaruh Kinerja Guru dan Kualifikasi Akademik Guru Terhadap Mutu Pendidikan, 1(1), 60–72.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang* (1 ed.). Jakarta: Erlangga. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=Sg-QAAAAMAAJ>
- Merini, D. (2022). Menakar Keefektifan Mandatory Spending Bidang Pendidikan. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 7(2), 115–132. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i2.626>
- Rahimah, Putra, M., & Sariakin. (2024). Rahimah Putra, Mulia Sariakin. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(4), 987–1001. Diambil dari <https://dinastirev.org/>
- Rutfiana, R. T., & Hayati, B. (2020). Analisis Pengaruh Pemberian Dana Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (Apk) Di Kabupaten / Kota. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 41–55. Diambil dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/31533>
- Saedy, M. R., Parulian, M., & Savio, D. (2016). TRANSFORMASI STRUKTURAL: FAKTOR-FAKTOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DI MADURA. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 25–44.
- Sallis, E. (1993). *Total Quality Management in education. British Library Cataloguing in Publication Data*. London: Kogan Page. https://doi.org/10.4324/9780203423660_chapter_5
- Sedyadi, G. S. M. (2014). *Kajian Pengaruh Desentralisasi Fiskal Asimetri di Indonesia terhadap Efisiensi Penyediaan Barang dan Layanan Publik Sektor Pendidikan*. Institut Teknologi Bandung.
- siska ayu, Suratno, & Kuswanto. (2021). THE ANALYSIS OF INFLUENCED FACTORS ON GER IN SENIOR HIGH, 10(1), 40–49.
- Todaro, M. P., & Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9 ed.). Jakarta: Erlangga.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11 ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
- Virdam, F., & Ariani, M. B. N. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PADA PROVINSI DI PULAU SULAWESI. *Jurnal of Development Economic and Digitalization*, 2(1), 20–35.
- Wardani, F., & Sanda. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan Pemerintah Daerah Terhadap Akses Pendidikan Dasar dan Menengah di Tingkat Kabupaten/Kota. *Jurnal BPPK Kemenkeu*. Diambil dari <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/download/525/279/>
- Wibowo, U. B. (2008). Output Lembaga Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, (02), 17–30. Diambil dari <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131656351/penelitian/B+2008+Output+Lembaga+Pendidikan.pdf>